



MANDIRI - MODERN - MASA KINI

SUARA BURUH

EDISI I SEP TAHUN 2019



■ TAK TERGIUR ROTI KEKUASAAN

■ Janji 100 Hari Kinerja,
Mau Buat Apa?

■ Murayakan 100 Tahun Usia ILO

SETELAH PESTA DEMOKRASI USAI

Head Office

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia

Jl.Cipinang Muara Raya No.33 Jatinegara

Jakarta Timur - INDONESIA 13420

Fax :

Tlp :

Web: ksbsi.org



BERITA FOTO



Bertempat di Kantor KSBSI, Cipinang Muara, Jakarta Timur, digelar agenda coffee morning, yang rutinitas dilakukan seminggu sekali. Untuk agenda diskusi minggu ini mengangkat tema koperasi dan mengundang perwakilan pembicara dari Koperasi Pekerja/Buruh Indonesia (KOPBI).



Jakarta - Sejumlah buruh yang tergabung dalam KSBSI DKI Jakarta gelar aksi di halaman PT. Interkos Jaya Bhakti yang beralamat di Jalan Indo Karya II, Blok G No.1 Sunter, Papanggo, Jakarta utara, Kamis (12/9/2019).



Bertempat di Kantor KSBSI, Cipinang Muara, Jakarta Timur, digelar agenda coffee morning, yang rutinitas dilakukan seminggu sekali. Untuk agenda diskusi minggu ini mengangkat tema koperasi dan mengundang perwakilan pembicara dari Koperasi Pekerja/Buruh Indonesia (KOPBI).

BERITA FOTO



KONGRES KSBSI KE VIII DEN KSBSI TERPILIH PERIODE 2019 -2024

Dari kiri Deputy Bid.Konsolidasi Surnadi, Bendahara Rasmina P, Presiden KSBSI Ely Rosita, Sekjend KSBSI Dedi Hardianto dan Deputy Bid.Program Markus S Sidauruk



DEN KSBSI AUDENSI DENGAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA HANIF DHAKIRI



DEN KSBSI AUDENSI DENGAN DPN APINDO



KSBSI peringati HUT RI KE 74 di Taman KSBSI

DAFTAR ISI

LAPORAN UTAMA 01

Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 baru saja usai. Pasangan pertahanan Joko Widodo-Ma'aruf Amin oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinyatakan menang

NFO KSBSI

Janji 100 Hari Kinerja, Mau Buat Apa?

OPINI

Merayakan 100 Tahun Usia ILO

BERITA NASIONAL

Kasus TPPO Masih Tinggi, Penindakan Masih Lemah

BERITA KASUS

Kado Jabatan TKA Yang Merugikan Buruh Lokal

BERITA DAERAH

Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 Hijrah KSBSI Ikut Festival Pawai Obor

BERITA KILAS

DEN KSBSI Audiensi Bersama Organisasi Buruh Internasional (ILO) Perwakilan Jakarta

Salam Redaksi



SUSUNAN REDAKSI

Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 baru saja usai. Tentu saja pesta demokrasi yang diadakan setiap 5 tahun sekali ini tak sedikit negara mengeluarkan biayanya. Ditambah lagi, selama kampanye Pilpres, masyarakat banyak disuguhkan berita fitnah (hoax) dan ujaran kebencian di media sosial (Medsos) yang sengaja dilakukan oleh orang-orang tak bertanggung jawab.

Tapi kita patut bersyukur. Walau proses pesta demokrasi kita banyak rintangan, Pilpres 2019 berjalan aman dan lancar. Dari dua kandidat pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) Ir. H Joko Widodo dan Prof. Dr (H.C) K.H Ma'aruf Amin dinyatakan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kemenangan kedua pasangan ini adalah kemenangan demokrasi rakyat. Bukan kemenangan demokrasi penguasa. Jadi tak ada lagi faksi-faksi politik ditengah masyarakat setelah pesta demokrasi. Karena demokrasi adalah hak pilihan bukan pemaksaan. Semua elemen masyarakat termasuk buruh harus kembali fokus memikirkan masa depan bangsa ini. Tak bisa dibantah, Indonesia hari ini memasuki babak revolusi industrialisasi 4.0. Segala kecanggihan teknologi berdampak terhadap buruh dan bisa menimbulkan bencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di perusahaan.

Oleh sebab itulah, pasca Pilpres 2019, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia menyatakan sikap setelah Jokowi-Ma'aruf resmi dilantik menjadi kepala dan wakil kepala negara akan tetap bersikap kritis. KSBSI akan terus menagih janji politik kedua pasangan tersebut pada masa kampanye Pilpres 2019. Seperti menagih janji mendorong peningkatan kualitas pendidikan serta keahlian tenaga kerja, khususnya untuk generasi muda agar Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) semakin menurun.

Tentu saja KSBSI menyadari Pekerjaan Rumah (PR) pemimpin negara kita nanti akan semakin banyak. Mengingat jumlah penduduk masyarakatnya pun salah satu terbesar di dunia. Namun PR itu akan bisa diselesaikan jika semua elemen masyarakat bergotong royong membangun Indonesia yang lebih pasti.

Serikat buruh pun harus bisa memastikan bahwa bangsa ini akan siap bangkit bersaing dalam dunia kerja menuju Bonus Demografi 2030. Dimana Indonesia pada tahun itu diprediksi menjadi negara perekonomian terkuat diwilayah Asia. Yakinlah, kita pasti bisa, selama harapan dan sikap optimis terus dirawat. Buruh bersatulah!

Wassalam,

Dedi Hardianto
Penanggung jawab

SUSUNAN REDAKSI:
ELY ROSITA SILABAN Presiden KSBSI
Penanggung Jawab

DEDI HARDIANTO Sekjend KSBSI
Penanggung Jawab

TUNJANG WALUYO Ketua Media
ANDREAS HUTAGALUNG Redaktur
DENIA Redaktur
EDI Anggota

KONTRIBUTOR:
REKSON SIALABAN
FEDERASI KSBSI
KORWIL KSBSI

DISTRIBUTOR:
SULASTRI
NOVARIA



Sumber foto Setkab.go.id

Nasib Buruh, Setelah Pesta Demokrasi Usai

Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 baru saja usai. Pasangan petahana Joko Widodo-Ma'aruf Amin oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinyatakan menang dengan peraihan suara mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen suara dari total 34 provinsi dan 130 wilayah luar negeri. Sementara, pasangan Prabowo-Sandi meraup suara dengan total 68.650.239 atau 44,50 persen suara. Atau disimpulkan selisih suara dari kedua pasangan mencapai 11 persen suara.

Tentunya, mantan walikota Solo itu terpilih kembali menjadi presiden, kemungkinan besar dia akan melanjutkan program Nawacita yang sepenuhnya dijalankan selama satu periode. Salah satunya urusan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih tertinggal dibanding negara Malaysia.

Pada kampanye Pilpres 2019, Jokowi berjanji, jika dia terpilih kembali presiden akan berkomitmen membenahi kualitas SDM ditengah era revolusi industrialisasi 4.0. Khususnya, prioritas pembenahan itu akan diberikan kepada lulusan SMK/SMA dan perguruan tinggi. Wujudnya dalam bentuk

program pelatihan (vokasi) yang berbasis teknologi digitalisasi.

Dalam kampanyenya, ia juga menyampaikan akan menjalankan Program Kartu Pekerja. Manfaat program itu nantinya mempercepat akses kerja ke perusahaan bagi calon pekerja. Lalu memberikan bantuan dana kepada peserta program kartu pekerja selama mengikuti program vokasi.

Nah, laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Mei 2019 menyampaikan jumlah tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari bulan Februari mencapai 5,01 persen. BPS mengklaim, jumlah TPT mengalami penurunan setiap tahun dari 2005. Walau terjadi penurunan, tapi sampai hari ini mayoritas TPT di Indonesia didominasi lulusan SD, SMP serta tingkat SMK/SMA.

BPS juga melaporkan sampai Februari 2019, keseluruhan jumlah pekerja di negara ini mencapai 129,36 juta orang. Untuk pekerja lulusan SD jumlahnya 40,51 persen. Untuk lulusan SMK/SMA sebesar 17,86 persen. Lalu lulusan Diploma sebesar 2,82 persen dan lulusan sarjana masih jauh dari harapan, hanya sebanyak 9,75 persen.

lulusan SMA sebesar 6,89 persen. Lalu lulusan Diploma sebesar 6,78 persen dan sarjana mencapai 6,24 persen. Artinya, pekerjaan rumah (PR) pemerintah kedepannya masih berat. Harus bisa menaikkan kualitas SDM di bidang pendidikan agar mampu bersaing di era globalisasi.

Bersikap Kritis

Tak bisa dibantah, pada Pilpres 2019, konfederasi serikat pekerja/buruh terbesar di Indonesia terlibat politik praktis dalam dukungan politik pasangan Capres/Cawapres. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja

Seluruh Indonesia (KPSPI) resmi mendukung Jokowi-Ma'aruf. Sementara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan dukungan pasangan Prabowo-Sandi.

Waktu itu, Mudhofir Khamid, mantan Presiden KSBSI menegaskan dukungan KSBSI kepada Presiden Joko Widodo, karena dinilai sukses membawa perubahan. Seperti percepatan pembangunan infrastruktur, melakukan perbaikan iklim investasi ekonomi dan membuka lapangan kerja.

"Selama satu periode kepemimpinan Jokowi-JK telah banyak membawa perubahan. Mereka berhasil mengambil alih saham PT Freeport Indonesia menjadi milik Indonesia. Dalam urusan Serta keamanan negara juga sangat stabil. Jadi wajar KSBSI mendukung, karena sejalan dengan perjuangan KSBSI," terangnya.

Dalam urusan dunia tenaga kerja, Mudhofir menganggap Jokowi telah memaksimalkan lapangan kerja pada era revolusi industrialisasi 4.0. Dia bergerak cepat memerintahkan membuka program vokasi dan peluang kerja berbasis teknologi digitalisasi diberbagai daerah.

"Tahun 2018 beliau berhasil menciptakan lapangan kerja sebanyak 2 juta angkatan muda kerja. Kami juga tak menutup mata, jika masih ada kelemahan pemerintahan Jokowi-

JK selama satu periode dalam persoalan pengangguran dan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK)," terangnya.



Mudhofir Khamid,SH

Hal senada juga disampaikan Elly Rosita Silaban, Presiden terpilih KSBSI. Dalam suatu kesempatan ia menegaskan, walau pertarungan Pilpres 2019 dimenangkan Jokowi-Ma'aruf, namun organisasinya tetap KSBSI bersikap kritis kepada pemerintah.

"KSBSI tetap merangkul pemerintah sebagai mitra dalam urusan ketenagakerjaan. Tapi satu sisi kami juga akan bersikap kritis, jika ada kebijakan tidak berpihak pada kesejahteraan buruh," tegas Elly, aktivis buruh pertama pertama yang memimpin KSBSI.

Dia juga mendesak setelah Jokowi-Ma'aruf dilantik nanti, kedua pemimpin itu harus memprioritaskan program ketenagakerjaan. Diantaranya akan menagih ucapan janji Jokowi revisi PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Sebab, KSBSI jauh-jauh hari telah menyiapkan tim perumusan draft revisi PP.78 yang nantinya akan diberikan kepada pemerintah.

Selain itu, Elly juga menyampaikan Jokowi-Ma'aruf harus bergerak cepat meningkatkan kualitas SDM. Dengan mempercepat peningkatan SDM, Elly yakin persoalan pengangguran akan berkurang jauh dalam persaingan globalisasi. Lalu ikut menjamin kebebasan serikat buruh hadir ditiap perusahaan sesuai semangat reformasi. Sebab, tak bisa dibantah, jika praktik pemberangusan serikat buruh (union busting) masih sering terjadi dalam perusahaan. (Andreas)



Pada Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kampanye politiknya mengatakan apabila terpilih kembali di periode kedua, dia akan mengeluarkan kebijakan program 'Kartu Pra Pekerja'. Tujuan program ini bermanfaat untuk lulusan SMA/SMK, Diploma dan S1 bagi yang ingin mencari kerja. Karena akan mendapat fasilitas pelatihan (vokasi) untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

Bagi yang mendapatkan kartu pra pekerja, pemerintah juga memberikan uang intensif tiap bulannya. Nah, bagi yang sudah mendapatkan pekerjaan, otomatis dana subsidi itu otomatis berhenti. Namun, wacana itu dianggap kontroversial sebagian masyarakat. Karena ada embel-embel uang intensif yang nantinya terkesan membuat masyarakat menjadi pemalas. Waktu itu Eduard Marpaung mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) langsung mendukung wacana yang digagas Jokowi. Pendapatnya,

bagi masyarakat yang menolak ide itu jangan berpikir sempit. Sebagai aktivis buruh, dia memahami tentang masih tingginya pengangguran, karena masih lemahnya kualitas SDM.

"Masyarakat kita masih didominasi masih lulusan tingkat SD, SMP, SMK/SMA dan SDM masih lemah. Sehingga pengangguran masih menjadi persoalan karena banyak calon angkatan kerja yang belum siap saing di dunia kerja," terangnya.

Ia tak setuju jika wacana program kartu pra kerja dianggap bisa membuat masyarakat menjadi pemalas. Karena uang intensif itu dikeluarkan dari Anggaran Perbelanjaan Negara (APBN). Sebab, subsidi bulanan yang diberikan sebenarnya untuk bantuan atau uang saku program pelatihan (vokasi).

Selain itu, tujuan kartu pra pekerja juga bermanfaat bagi pekerja yang terkena kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selama dia



"Namun jika yang terkena PHK sudah bekerja kembali, maka tidak mendapat subsidi lagi. Termasuk, bagi angkatan muda yang sudah bekerja, bantuan subsidi dari pemerintah juga langsung dihentikan," jelasnya.

Eduard juga mengatakan konsep kartu pra pekerja sudah lama diterapkan di negara-negara maju. Dimana dana subsidinya juga hasil dari uang pajak masyarakat yang diberikan kepada negara. Jadi sangat wajar, ketika masyarakat sudah memberikan iuran pajak, negara harus punya peran subsidi bagi yang belum bekerja maupun korban PHK.

"Kalau di negara maju seperti di Eropa, pemerintahnya justru serius melindungi masyarakatnya dari yang masa pra kerja sampai bekerja. Bahkan sudah memberikan program jaminan sosial yang sifatnya melindungi masyarakatnya dari hidup sampai meninggal," tutupnya.

Dilansir dari DetikFinance, Bima Yudistira Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyampaikan program kartu pekerja yang hendak diterapkan pemerintah belum tentu berdampak mengurangi pengangguran.

Menurutnya, sebelum program kartu pekerja direalisasikan, pemerintah harus memperhatikan kondisi penyerapan tenaga kerja sekarang ini. Pasalnya, pertumbuhan lapangan kerja justru sedang melambat, seperti di sektor industri manufaktur.

Intinya, tujuan program kartu pra kerja memang sangat bagus. Namun, untuk memperkuat kualitas SDM, sebaiknya pemerintah harus menaikkan kualitas pendidikan formal sesuai perkembangan era revolusi industrialisasi 4.0.

"Tugas pemerintah juga harus bisa menciptakan lulusan institusi pendidikan dari tingkat SMA/SMK dan kampus yang sudah siap bersaing di dunia kerja. Karena problem pendidikan kita selama ini masih minim menciptakan lulusan yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan pasar," tegasnya.

Mengingat pertumbuhan ekonomi dunia sedang melambat dan berdampak pada pertumbuhan industri, Bima menyarankan agar pemerintah fokus meningkatkan investor masuk ke Indonesia. Dia yakin, jika pemerintah meyakinkan masuk ke negara ini dengan memberikan fasilitas infrastruktur yang baik, maka pertumbuhan ekonomi pun merangkak naik.

Sebab, kalau program kartu pra kerja dijalankan, namun pertumbuhan ekonomi lamban akibat investor tidak membuka lapangan kerja, sama saja hasilnya tak maksimal. Karena sudah pasti hasil dari program pelatihan yang disediakan program prak kerja minim lapangan kerja.

"Kalau pertumbuhan naik secara positif, maka lapangan kerja pun semakin terbuka lebar. Jadi seimbang dengan realisasi program kartu pra kerja," ucapnya.

Tak lama lagi, pasangan Jokowi-Ma'aruf akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Masyarakat pun berharap Jokowi segera menepati janji politiknya mengenai program kartu pra kerja. Waktu masa kampanye Pilpres, Jokowi sempat ditanya awak media mengenai berapa subsidi yang akan diberikan kepada peserta kartu pra kerja.

Mendapat pertanyaan seperti itu, ia hanya menjawab masih rahasia, belum bisa diputuskan berapa kisaran subsidi tiap bulannya. Namun dia lebih menekankan program kartu pra kerja diprioritaskan untuk generasi muda yang sudah lulus dari SMA atau SMK maupun yang lulus dari politeknik dan universitas.

Dia menekankan, program pelatihan yang akan dijalankan nanti harus itu dibimbing oleh orang yang profesional dibidangnya. Agar nanti, peserta yang selesai mengikuti program pelatihan langsung diminati oleh perusahaan. (Andreas)

Tak Tergiur Roti Kekuasaan



Ely Rosita Silaban Presiden KSBSI 2019-2024

Pada kampanye Pilpres 2019, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) salah satu serikat buruh yang menyatakan sikap mendukung pasangan Ir. H Joko Widodo-Prof. Dr. KH Ma'aruf Amin sebagai calon presiden dan wakil presiden. Walau telah ikut gotong royong memenangkan kedua pasangan itu, ternyata KSBSI menyatakan sikap akan menjadi serikat buruh yang kritis dan independen. Tidak mau dibawah bayang-bayang pemerintah.

Ely Rosita Silaban, Presiden KSBSI menegaskan organisasi yang dipimpinnya akat menagih janji politik Jokowi-Ma'aruf saat kampanye Pilpres 2019. Ditegaskannya, ada tugas yang harus diselesaikan dua kepala negara itu dalam ketenagakerjaan. Terutama revisi PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan serta wacana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) Tahun 2003.

Menurutnya, revisi UUK sulit dibahas tahun ini. Karena periode DPR RI 2004-2019 akan berakhir, jadi bisa tahun depan dibahas kalau masuk program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dia juga menilai UUK sudah tak layak lagi direvisi. Sebaiknya perlu dibuat produk



Dedi Hardianto Sekjend KSBSI 2019-2024

undang-undang baru sesuai perkembangan jaman.

Intinya, dia menegaskan Dewan Pengurus Nasional atau DEN KSBSI periode 2019-2024 telah berkomitmen tidak menerima roti kekuasaan jika ditawarkan. Sikap ini sudah disepakati pada Kongres KSBSI bulan Juni kemarin. Agar KSBSI tetap kritis mengawasi kebijakan pemerintah.

"Kami lebih memilih fokus membesarkan organisasi. Tapi kalau pemerintah meminta, Juni kemarin. Agar KSBSI tetap kritis mengawasi kebijakan pemerintah.

"Kami lebih memilih fokus membesarkan organisasi. Tapi kalau pemerintah meminta, KSBSI akan merekomendasikan perwakilan kader terbaik mengisi jabatan kekuasaan," ujarnya.

Ia pun berharap pemerintah nantinya harus bekerja keras meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pasalnya, ditengah Indonesia menyambut bonus demografi 2030, tapi kelemahan SDM bangsa ini masih lemah. "Sebaiknya pemerintah merubah kurikulum pendidikan yang hanya sebatas teori. Perlu

ada terobosan program pendidikan pelatihan biar kualitas persaingan dunia kerja meningkat,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Dedi Hardianto, Sekjen KSBSI. Dia mendesak Jokowi-Ma'aruf jangan lari dari janji tentang slogan kampanye 'Kerja layak, upah layak, hidup layak' serta memprioritaskan revisi PP No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Jika tidak direvisi, kondisi pengupahan di Indonesia tidak ada perubahan.

Karena ada beberapa pasal di PP tersebut jelas merugikan buruh. Bahkan pengusaha termasuk ikut dirugikan. KSBSI sudah mengajukan draft revisi PP No 78 Tahun 2015 ke pemerintah. Dimana isi draft yang ditawarkan solusi jalan tengah, supaya tak ada lagi pihak yang dirugikan.

Selain itu, pemerintah fokus pada program perumahan buruh yang telah dijalankan. Sebab, masih banyak buruh belum mendapatkan hak rumah yang layak. Padahal dana negara tak sedikit yang sudah digelontorkan.

“Justru yang menempati perumahan subsidi buruh ini kami temukan kabarnya banyak pemilik siluman dan ada beberapa lokasi perumahan tanahnya sedang bermasalah,” tegasnya.

Era teknologi revolusi industrialisasi 4.0, memang memiliki dampak terhadap ketenagakerjaan. Sebab banyak buruh kehilangan pekerja, akibat beralihnya tenaga manusia ke teknologi canggih. Untuk itulah, Dedi mendesak pemerintah fokus dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bentuk pelatihan (vokasi).

Memang pemerintah gencar menggalakan program vokasi. Namun menurutnya, program itu belum menyentuh pada substansinya. Kabar yang ia dapat masih

banyak Badan Latihan Kerja (BLK) diberbagai daerah masih menggunakan alat mesin lama.

“Ini kan sangat tidak relevan lagi di era teknologi revolusi industrialisasi 4.0. Kalau kita lihat BLK di negara Singapura, alat praktik mereka semua serba canggih canggih. Jadi wajar saja lulusan program vokasinya, langsung siap bersaing di dunia kerja,” tuturnya.

Dedi tak membantah jika posisi KSBSI disatu sisi sebagai mitra pemerintah, tapi bukan berarti tunduk. Apabila ada kebijakan pemerintah yang tak berpihak, KSBSI pasti bersikap kritis dan turun ke jalan. Seperti keluarnya kebijakan Kepnaker No.228 Tahun 2019 Tentang Tenaga Kerja Asing (TKA), dinilainya sangat merugikan

Keluarnya Permen itu terbit dengan diam-diam dan beberapa pasal terkesan menguntungkan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia. Karena diberikan karpet merah jabatan perusahaan di Indonesia tanpa ada kriteria lagi.

Waktu ditanya, siapa layak menjadi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) kabinet Jokowi-Ma'aruf, ia menjawab sebaiknya diserahkan kepada presiden sebagai pengambil keputusan. Namun secara pribadi, dia mengatakan KSBSI memiliki kader berkualitas seperti sosok Rekson Silaban, mantan Presiden KSBSI.

“Beliau layak Menaker. Pemikirannya sangat brilian dalam urusan ketenagakerjaan. Jaringannya dikalangan serikat buruh pun tak diragukan lagi, sudah sampai ke dunia internasional,” jelasnya. (Andreas)

Janji 100 Hari Kinerja, Mau Buat Apa?

Kongres ke VIII Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) pada 2019 baru saja usai bulan Juni kemarin. Dalam forum kongres itu penuh dinamika perbedaan, perdebatan untuk merumuskan masa depan KSBSI agar lebih baik. Dewan Eksekutif Nasional atau DEN KSBSI periode 2019-2022 juga sudah terpilih melalui forum yang demokratis.

Tentunya, setelah pesta demokrasi KSBSI usai, sudah waktunya pula seluruh pengurus dari tingkat pusat sampai daerah harus bekerja keras. KSBSI harus menjawab tantangan jaman, mempertahankan kebesaran organisasinya ditengah era revolusi industrialisasi 4.0. Jika KSBSI tak mampu membaca tantangan jaman, maka kapal besar organisasi akan tenggelam.

Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja

(Kemnaker) setiap tahun jumlah serikat buruh setiap tahun terus bertambah.



Surnadi Dewan Pengupahan KSBSI

Namun ironisnya, minat buruh bergabung ke serikat buruh tak bertambah atau jalan ditempat.

Surnadi Deputi Konsolidasi DEN KSBSI menyadari jika dinamika gerakan buruh sedang mengalami krisis identitas. Padahal semangat gerakan buruh adalah solidaritas, namun fakta yang terjadi hari ini kondisi serikat pekerja/buruh banyak

mengalami konflik internal. Lalu terjadi perpecahan.

“Kami tak mau KSBSI menjadi serikat buruh yang terus mengalami konflik dan terpecah lagi. DEN KSBSI yang baru terpilih berkomitmen dalam program 100 hari harus membawa dampak perubahan. Terutama perbaikan administrasi dan memperkuat konsolidasi internal lintas federasi,” ujarnya, ketika diwawancarai.

Selain itu tugas DEN KSBSI akan fokus menyikapi isu ketenagakerjaan No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan serta Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003. KSBSI sendiri sudah mempersiapkan tim revisi kajian. Hasilnya nanti akan direkomendasikan ke pemerintah dan harus berkualitas, berpihak pada kepentingan buruh.

Untuk jaringan tingkat nasional, Surnadi menyampaikan DEN KSBSI sudah bergerak membangun jaringan. Bahkan terus

melakukan kunjungan ke beberapa instansi pemerintah, lintas serikat buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Semuanya itu dilakukan dalam rangka mengenalkan kepengurusan yang baru serta memaparkan visi dan misi perjuangan KSBSI.

“KSBSI juga sudah mempelopori lahirnya aliansi lintas serikat pekerja/buruh. Nah diharapkan nantinya aliansi yang dibangun bisa bersama-sama membangun untuk menyikapi isu ketenagakerjaan,” ujarnya. Untuk jaringan internasional, KSBSI berencana akan merebut posisi Body Governing International Labor Organization (ILO).

Posisi tersebut dinilai layak di emban Elly Rosita Silaban Presiden KSBSI. Karena untuk tingkat Asia Tenggara, hanya dia satu-satunya pemimpin konfederasi serikat buruh dari perwakilan perempuan.

“DEN KSBSI siap berjuang mendorong Presiden KSBSI menjadi Body Governing bagi ILO. Sepak terjang beliau sudah teruji di pergerakan serikat buruh dari tingkat nasional dan internasional. Nah dia juga dikenal aktivis buruh perempuan yang konsisten memperjuangkan hak kesetaraan gender,” terangnya.

Posisi Lemah?

Ia juga tak menutupi jika posisi tawar serikat buruh sedang mengalami penurunan. Fenomena yang terjadi, jumlah konfederasi serikat buruh sampai federasi terus menambah dari tingkat nasional sampai daerah. Tapi jumlah anggota serikat buruh keseluruhan tidak bertambah. Sebab, yang tercatat di Kementerian Tenaga Kerja hanya 2,7 juta orang.

Satu-satunya memperkuat posisinya tawar, ya harus melakukan konsolidasi nasional di 23 provinsi dari semua lintas federasi yang



berafiliasi dengan KSBSI. Membuka cabang baru dan menambah jumlah anggota. Lalu melakukan konsolidasi tingkat coordinator wilayah (Korwil) dan menata pola kerjanya.

“Saya pikir ini tugas berat yang akan dilakukan DEN KSBSI. Namun kalau semua lintas federasi saling bersinergi, saya optimis semuanya bisa terwujud,” pungkasnya.

Intinya jika ingin KSBSI ingin besar kembali, semua elemen harus fokus bekerja. konsisten menjalankan kewajiban iuran dan taat pada AD/ART organisasi. Selain itu karakter gerakan KSBSI harus menjadi serikat buruh modern, mandiri, moderat, militan dan mengikuti perkembangan revolusi industrialisasi 4.0.

“Pola pengkaderan untuk regenerasi kepemimpinan akan banyak dirubah. Kalau modul pendidikan tak mengikuti perkembangan jaman, gerakan bisa mati suri. KSBSI harus mampu melahirkan kader muda yang militan membela buruh. Unggul intelektual dalam melahirkan gagasan,” tegasnya.

Ary Joko Sulisty, Ketua Umum DPP FSB GARTEKS KSBSI menyarankan sebaiknya DEN KSBSI yang baru terpilih

memiliki rencana kerja jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk memperkuat kinerja, sebaiknya departemen- departemeni kembali diberdayakan dengan orang yang berkompeten dibidangnya untuk mendukung kinerja setiap deputi.

“Organisasi ini perlu kembali membangun kekuatannya dari tingkat nasional sampai jaringan karingan serikat buruh internasional,” terangnya.

DEN KSBSI juga harus bisa membangun opini dan komunikasi ke media massa terkait isu ketenagakerjaan. Sebab, peran media sangat strategis untuk mempengaruhi pemerintah, pengusaha, LSM dan masyarakat. Pasca kongres KSBSI ke VIII, ia juga berharap setiap federasi tidak lagi mempersoalkan puas atau tidak puas hasil keputusan kongres tapi harus bersikap dewasa dama berdemokrasi.

“DEN KSBSI dan federasi yang berafiliasi harus bisa membangun konsolidasi sampai akar rumput. KSBSI bisa besar kembali kalau gotong royong melakukannya tanpa ada arogansi. Saya juga meminta agar ada pemerataan program tiap federasi. Karena berdasarkan pengalaman, program pelatihan masih jarang terealisasi ke federasi,” tegasnya.

Joko juga menyampaikan, walau posisi KSBSI menyatakan sebagai mitra pemerintah, namun bukan berarti bisa di setir. Ia berharap agar DEN KSBSI tetap kritis. Artinya, jika ada kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan buruh, silahkan di dukung.

“Tapi kalau kebijakannya merugikan buruh dan masyarakat luas, DEN KSBSI harus bersikap kritis. Tidak ada kata kompromi dengan pemerintah dan pengusaha kalau kebijakannya merugikan,” lugasnya.

Contohnya menyikapi isu revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 yang sedang gaduh saat ini, Joko berharap agar DEN KSBSI tetap mengawalinya dengan kritis. Sebab lahirnya serikat buruh ini asalnya dari buruh, bukan lahir dari kandungan pemerintah dan pengusaha.

“Saya berharap kita semua harus merawat tradisinya sebagai serikat buruh yang kritis. Sudah waktunya juga menegaskan bahwa KSBSI sebagai gerakan sosial yang tak hanya menyikapi isu ketenagakerjaan,” ucapnya.



M. Hory Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI DKI Jakarta juga ikut mendukung jika DEN KSBSI yang baru terpilih berkomitmen membawa perubahan. Dia menjelaskan, posisi Korwil adalah kepanjangan tangan yang selalu menjalankan perintah komando. Oleh sebab itulah, Horry mengatakan jika posisi Korwil sebagai ujung tombak, maka sudah waktunya diperhatikan agar nantinya saling bersinergitas.

“Selama ini ada kesan posisi Korwil hanya dipandang anak tiri, jarang diperhatikan. Saya berharap segera dibuat kedudukan mekanisme Korwil dan federasi yang bisa saling bersinergi,” jelasnya.

Dia juga menekankan agar DEN KSBSI dalam urusan perekrutan anggota sebaiknya dibentuk dahulu tim kerja organizer. Dimana, tugas tim kerja ini membuat pelatihan organisasi dan kepemimpinan lintas federasi. Sampai akhirnya anggota yang dilatih menjadi kader militan yang siap memimpin organisasi.

Intinya, ia optimis KSBSI akan maju termasuk di DKI Jakarta, kalau semua meninggalkan sifat individual. Karena organisasi ini tidak cukup hanya duduk manis kalau ingin besar. Namun perlu kerja keras dan gagasan baru.

“KSBSI sekarang sebagai serikat buruh posisi 3 besar di Indonesia. Kita harus yakin kalau kita bisa berada diperingkat satu atau dua kalau semuanya bekerja keras. Semua harus meninggalkan pola lama yang rentan dengan konflik namun sudah waktunya berpikir modern dan mengendepankan gagasan,” tutupnya. (AH/Deni)

Merayakan 100 Tahun Usia ILO

Rekson Silaban
(Analisis senior Indonesia Labor Institute)



Dokumen KSBSI

Tahun ini Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menapaki usia yang ke 100 tahun. Konferensi tahunan ILO yang baru saja selesai (10-21 Juni) di Geneva, Swiss menelurkan tiga hasil monumental; pertama, lahirnya Konvensi ILO baru nomor 190 mengenai Kekerasan dan Pelecehan di tempat kerja (Violence and Harassment Convention); kedua, rekomendasi ILO nomor 206 tentang panduan untuk pemerintah dalam

mengimplementasikan konvensi 190 (Violence and Harassment Recommendation); yang terakhir adalah Deklarasi ILO tentang masa depan pekerjaan (Centenary Declaration for the Future of Work) Deklarasi ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan masa depan pekerjaan dunia, di tengah terjadinya transformasi dunia kerja akibat desakan inovasi teknologi; pergeseran demografi; perubahan iklim dan globalisasi. ILO ingin

menegaskan bahwa misi utama mereka untuk menciptakan keadilan sosial bagi pekerja tetap relevan menapaki perababan selanjutnya. Sekaligus menekankan pentingnya mekanisme dialog sosial dalam menangani berbagai konflik industrial. Juga diingatkan ulang bahwa ILO akan terus melakukan pendekatan yang berpusat kepada kemanusiaan (human-centered approach) dalam menjalankan misinya.

Dokumen ILO "The Future of Work" dijadikan sebagai basis perbincangan konferensi. Dalam pidato pembukaan, Direktur General ILO, Guy Rider menyatakan "masa depan pekerjaan dunia akan ditentukan oleh hasil keputusan kita sendiri, bukan oleh robot, bukan oleh kecerdasan buatan atau yang lainnya". Optimisme Guy Rider menjawab kekuatiran banyak pihak tentang adanya persaingan mesin dengan manusia yang nantinya dimenangkan oleh mesin. Tulisan terbaru Yuval Noah Harari dalam bukunya "21 Lessons for the 21st Century" (Penguin, UK, 2018), menyampaikan analisis tentang dunia yang sedang menghadapi krisis ideologi, dengan munculnya kebangkitan politik ideologi kebangsaan, seperti ultra nationalism dan populism.

Sejak lama para pemikir politik dunia percaya bahwa sejarah dunia telah berakhir di bawah ideologi liberal demokrasi, setelah kegagalan ideologi fasisme dan komunisme paska

Perang Dunia ke dua. Jadi hampir semua negara percaya bahwa satu-satunya jalan untuk maju adalah dengan mengikuti mantra ideologi liberal demokrasi: adanya demokrasi dengan aturan hukum, penghargaan terhadap HAM, pasar bebas, negara kesejahteraan.

Belakangan ada yang meragukan ideologi liberal demokrasi karena gagal menjawab berbagai masalah

ekonomi, sosial, sehingga muncul kembali semangat ultra nasionalisme dengan menjual isu proteksionisme dan agama untuk mendapatkan kemenangan dalam pemilihan umum. Kemenangan presiden Amerika Serikat Donald Trump, hengkannya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), kemenangan partai-partai aliran kanan di Eropa dan belahan dunia lainnya dalam Pemilu akhir-akhir ini, menguatkan kembalinya politik nasionalisme sempit yang hanya mementingkan negaranya.

Bila kecenderungan ini terus membesar, siapakah nantinya yang peduli dengan urusan global? Dan sudah pasti bisa dipastikan masa depan pekerjaan dunia dalam situasi ikut memburuk. Solusi untuk menyelesaikan masalah masa kini dan masa depan tidak bisa diselesaikan dengan kembali menggunakan semangat masa lalu yang terbukti sudah pernah gagal, bahkan membuat dunia terjebak perang berkepanjangan.

Kontribusi ILO Dalam Sejarah

Didirikan di Prancis tahun 1919 sebagai bagian perjanjian damai di akhir perang Dunia Pertama yang dikenal dengan "Versailles Peace Treaty". Pendirian ILO awalnya hanya dimotori 9 negara industri maju; Belgia, Prancis, Italia, Jerman, Inggris, Belanda, Spanyol, Swiss dan Amerika Serikat. Tapi dalam

perjalanannya sampai di usia 100 tahun, bertumbuh menjadi 186 negara. Dari seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tinggal 6 negara yang belum anggota ILO, termasuk Korea Utara, Monaco. Banyak orang tidak tahu bahwa ILO adalah badan PBB tertua dan di dunia yang didirikan jauh sebelum pendirian PBB tahun 1945.

ILO memiliki keunikan yang tidak dikenal dalam badan-badan PBB lainnya yaitu: tata kelola organisasinya dilakukan secara tripartit (pemerintah, serikat buruh, organisasi pengusaha). Semua program, penganggaran dan aktifitas ILO dirancang dan diawasi oleh badan "Governing Body" yang merupakan wakil tripartit dunia. Mereka dipilih dalam konferensi ILO secara berkala. Sementara untuk menjalankan operasionalnya dilakukan oleh Direktur Jenderal yang dipilih oleh governing body.

Deklarasi "Centennial" akan menjadi deklarasi ILO ke empat sepanjang usianya. Dalam 100 tahun eksistensi ILO, baru ada tiga deklarasi yang pernah dilahirkan. Pertama, Deklarasi Philadelphia tahun 1944 mengeluarkan pertanyaan yang terkenal "labour is not a commodity". Buruh tidak boleh diperjual belikan seperti barang dagangan. Yang ke dua adalah Deklarasi Tentang prinsip dasar dan hak di tempat kerja, tahun 1998. Sementara yang ketiga adalah Deklarasi tentang keadilan sosial untuk globalisasi yang adil dibuat tahun 2008.

BPJS Ketenagakerjaan Apresiasi

Perusahaan Tertib Administrasi

Kehadiran negara memberikan perlindungan pada tenaga kerja sudah diatur dalam undang-undang dan menjadi hak bagi pekerja. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) sebagai jembatan atas perlindungan tersebut akan memastikan bahwa apa yang menjadi hak tenaga kerja, diterima tenaga kerja tersebut.

Direktur Kepesertaan BPJSTK, Ilyas Lubis mengatakan bahwa negara hadir untuk memberikan kepastian akan perlindungan bagi tenaga kerja. Selain pemerintah daerah yang menjadi perpanjangan tangan pusat, perusahaan sebagai penyedia lapangan kerja juga mendapatkan apresiasi.

"Karena itulah kemudian ada penghargaan atau award Paritrana. Dan Provinsi Kepri dengan jumlah naker yang banyak jika mendapat support dari pemerintah daerah, maka akan menunggu waktu disertai penghargaan oleh Presiden," ungkap Ilyas, Rabu (2/10).

Anugerah Paritrana merupakan kali ketiga yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan sejak digalang sejak tahun 2017 silam. Bahkan tahun ini, sebanyak 33 Pemerintah Provinsi, 105 Pemerintah Kabupaten Kota, 89 Perusahaan Skala Besar dan 80 Perusahaan Skala Menengah serta 33 UKM (Usaha Kecil dan Mikro) turut berpartisipasi untuk merebut Anugerah Paritrana.

Untuk proses penilaian akan dilakukan melalui seleksi tingkat wilayah oleh Tim penilai daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Tingkat Provinsi, Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan tingkat provinsi, Kepala Dinas yang membidangi UMKM di tingkat provinsi,



Apindo provinsi, Serikat Pekerja, dan tim dari Bidang Kepesertaan Wilayah atau Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Ibukota Provinsi.

Untuk penilaian pemenang, Ilyas mengatakan akan terdiri dari beberapa 4 aspek penilaian diantaranya Aspek Kebijakan, Aspek Penerapan, Aspek Kinerja dan terakhir adalah wawancara. "Wawancara nanti akan dilakukan bersama tim penilai independen yang terdiri dari ahli jaminan sosial, praktisi, pejabat kementerian, dan tentu saja dari BPJS Ketenagakerjaan," terangnya.

Deputi Direktur Wilayah Sumbarriau Budiono mengapresiasi terhadap prestasi yang telah dicapai oleh Kota Tanjungpinang sebagai kabupaten kota terbaik nomor 2 nasional dan PT Pertama Precision Bintang yang berhasil mendapat penghargaan Paritrana dalam kategori perusahaan menengah pada Penghargaan Paritrana Tahun 2018.

Ia berharap semoga para pemenang tahun dapat mempertahankan dan memberi pengaruh positif kepada Pemerintah Daerah lain dan seluruh pengusaha untuk terus mendukung implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Saya berharap untuk di tahun ini ada perwakilan dari wilayah Sumbarriau (Sumber: bpjsketenagakerjaan.go.id)

Barat, Pekanbaru dan Kepulauan Riau) baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota / Kabupaten, dan Badan usaha yang mendapatkan penghargaan tersebut," tuturnya.

Budiono juga menginginkan Anugerah Paritrana ini dapat mendukung harmonisasi seluruh regulasi yang ada terkait jaminan sosial dan bagi perusahaan agar mendukung tertib administrasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu juga untuk mempertegas pentingnya peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan implementasi jaminan sosial. Ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.

"Anugerah Paritrana ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat yang dapat memotivasi semua pihak, agar perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja di Indonesia dapat segera terwujud," tutupnya.

Dalam kesempatan itu juga BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan secara simbolis dengan total nominal Rp 256.141.398 kepada 3 orang ahli waris peserta. Santunan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Kepesertaan Ilyas Iubis dan Deputi Direktur Wilayah Sumbawati Budiono kepada ahli waris Siti Aminah yang mendapatkan manfaat Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp. 53,194,980.

Kemudian kepada ahli waris Suparman yang mendapatkan manfaat Jaminan Kematian sebesar Rp 24.000.000 dan terakhir kepada ahli waris Ernawati yang mendapatkan manfaat Program Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan beasiswa pendidikan dengan total mencapai Rp 178.946.418.

Wagub Jabar Serahkan Simbolis Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Wakil Gubernur (Wagub) Jabar, UU Ruzhanul Ulum menyerahkan secara simbolis Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada Tenaga Penggerak Desa (TPD) sebagai bentuk kerjasama dengan BKKBN. "Kami mengapresiasi langkah kerjasama yang dilakukan BKKBN dan BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi para Tenaga Penggerak Desa," kata Wagub.

Kuswahyudi menjelaskan, karena sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan sudah menjalin komitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah tingkat Provinsi Jabar secara bersama-sama menyosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan. Ini dilakukan sesuai UU RI No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU RI No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

"Secara keseluruhannya di Jabar ada 5.100 desa yang akan jadi mitra BPJS Ketenagakerjaan, dan kami pun sudah punya Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan salah satunya di Kabupaten Sukabumi," terangnya.



Menurutnya, pihaknya pernah me-launching di Desa Loji Kecamatan Simpenan, dan di Kota Sukabumi juga pernah.

"Itu semua dilakukan agar itu semua terlindungi baik pekerja formal maupun informal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," tukas Kuswahyudi.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi, Emir Syarif Ismel yang mendampingi Kuswahyudi mengatakan semangat pihaknya adalah semangat perlindungan bagi seluruh pekerja.

"Ada empat Program BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP) yang semua program-programnya memberikan manfaat maksimal bagi peserta," tutup Emir. (Sumber: bpjsketenagakerjaan.go.id)

Ada 3 tantangan yang harus dijawab dalam memudahkan negara-negara anggota ILO mengurai kompleksitas masa depan pekerjaan yang terancam di PHK akibat distrupsi; pertama, apa kebijakan penyesuaian yang dibuat pemerintah agar mendapat manfaat dari revolusi industri 4.0 ini. Kedua, apa alternatif pekerjaan yang harus disiapkan sebagai pengganti pekerjaan yang hilang akibat distrupsi. Ketiga, mengingat tidak semua pekerja bisa secara otomatis disuruh beradaptasi sekalipun sudah dilatih apa skema yang dipikirkan pemerintah untuk potensi penganggur ini?

Human-centered approach

Beberapa kepala negara yang berpidato dalam konferensi ini meminta ILO terus mempertahankan prinsip utamanya sebagai agen keadilan sosial, dengan pendekatan yang berpusat kemanusiaan, melalui dialog sosial dalam tripartit. Sebab ada banyak kecenderungan demi mencapai pertumbuhan ekonomi, negara mengenyampingkan pemerataan. Bahkan banyak yang percaya terhadap teori tentang situasi ketidakmerataan sebagai hal laziness sebagai prasyarat dalam menuju negara maju. Padahal ini hanya melegitimasi ketidakmampuan negara mengatasi ketimpangan ekonomi. Ketimpangan selalu berakhir buruk, salah satu kerugiannya adalah hilangnya potensi negara menggunakan tenaga kerja yang berpotensi

karena kesempatan yang tidak merata. Ketidaksetaraan gender, praktek diskriminasi berlatar belakang SARA, xenophobia, dan sebagainya, akan menghambat sebuah negara memiliki SDM yang berkualitas, produktif dan kreatif.

Kembali mengenai digital ekonomi, tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa era digital ekonomi akan membuat kehidupan pekerja lebih baik. Memang ada keuntungan dari fleksibilitas kerja dan kemudahan kerja, tetapi harus diingat digital ekonomi akan membuat pekerja gampang kehilangan kerja, sesuai sifat digital yang terus menuntut perubahan dan kreasi baru.

Pada situasi inilah banyak pekerja akan selalu dalam kondisi rentan, karena mereka tidak memiliki kesempatan berkarir dalam jangka panjang dalam satu lembaga. Akibatnya tidak sempat mengiur tabungan yang dikontribusi secara tetap dalam jangka panjang. Juga tidak bisa bertahan lama sebagai peserta Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun di BPJS ketenagakerjaan. Bagi pekerja usia muda bekerja di ekonomi digital akan menarik, tetapi akan berbeda saat mereka memiliki keluarga yang membutuhkan pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Digital ekonomi mensyaratkan pekerja dengan kecerdasan digital (digital intelegence). Jenis pekerjaan ini tidak banyak tersedia di negara

berkembang seperti Indonesia. Tidak mudah memberikan pelatihan keahlian digital kepada pekerja yang selama hidupnya jarang bersentuhan dengan teknologi. Jadi akan banyak guncangan bila negara seperti Indonesia mengikuti digitalisasi ekonomi secara massif.

Indonesia sudah memiliki peta jalan untuk revolusi Industri 4 yang dituangkan dalam Indonesia Making Industri 4.0.

Sayangnya masih bersifat sektoral, belum melibatkan departemen lainnya, seperti perubahan sistem pendidikan sebagai faktor penting dalam menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja.

Semoga dalam periode kedua masa pemerintahan pak Jokowi kebutuhan ini akan diselesaikan. Karena Indonesia memerlukan sistem baru dalam banyak hal. Termasuk rancangan tambahan untuk jaminan sosial, pelatihan kerja, undang-undang ketenagakerjaan baru, regulasi pekerja daring, dan sebagainya. Tapi yang paling penting kita sepakati adalah, marilah mengganti mantra lama pertumbuhan ekonomi dengan mantra baru: keadilan sosial dan pemerataan kesempatan bagi seluruh rakyat.





Foto pixabay.com

Kasus TPPO Masih Tinggi, Penindakan Masih Lemah

Meski pemerintah sudah mensahkan Undang-Undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia namun kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tetap saja masih tinggi. Modus yang dilakukan pelaku TPPO pun begitu rapi. Agar bisa tergiur, pelaku sindikat TPPO, selalu menawarkan kepada korban bekerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Seperti di negara Arab Saudi, Mesir, Singapura dan beberapa negara lainnya.

Baru-baru ini, Bareskrim Mabes Polri kembali membongkar kejahatan TPPO dan membeberkan ada ada sekitar 1.314 korban yang tertipu di beberapa daerah. Berdasarkan pengakuan sebagian besar pelaku pemain yang sudah berpengalaman untuk merekrut korban. Ada yang menjadi spesialis pencari korban, agen atau sponsor. Akhirnya pelaku ini diringkus, setelah mendapat laporan dari korban dan masyarakat.

Dalam keterangan pers, Brigadir Jenderal Polisi Nico Afinta Direktorat Tindak Pidana Umum dalam mengatakan pelaku yang Polisi Nico Afinta Direktorat Tindak Pidana Umum dalam mengatakan pelaku yang

ditangkap ditempat berbeda beda. Seperti yang dilakukan Mamun, pelaku TPPO, dia sudah berperan menjadi perekrut PMI non prosedural sejak tahun 2011 dan akhirnya ditangkap tahun ini.

“Dari bisnis yang dilakukannya, pelaku bisa meraup penghasilan kurang lebih 40 juta rupiah tiap bulan. Menurut pengakuan pelaku, sudah lebih dari 500 orang pekerja migran non prosedural seperti ke Arab Saudi, Suriah, Mesir dan Hongkong,” ungkap Nico.

Lalu ada tersangka lainnya berperan menjadi sponsor bernama Faisal Fahrurroji. Pelaku ini berperan penting memberangkatkan korban pekerja migran non prosedural. Korban yang akan dikirim Faisal pada umumnya bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) lewat rute Jakarta-Batam-Kuala Lumpur-Arab Saudi.

“Dia bisa meraup keuntungan 60 juta perbulan. Dia mengaku sudah menggeluti

bisnis ilegal ini sejak tahun 2016 dan kami tangkap tahun ini,” jelasnya.

Nico mengatakan pihak Kepolisian akan terus mengusut kasus TPPO yang marak terjadi. Sebab, diantara korban TPPO ada yang disiksa oleh majikannya di luar negeri

dan terancam lumpuh. Pelaku TPPO akan dijerat Pasal 4 UU RI nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Pasal 81, Pasal 86 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang PPMI.

Bareskrim Mabes Polri juga mengungkapkan beberapa daerah yang sangat rentan dengan kasus TPPO. Diantaranya, daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Barat. Bahkan sebagian korban ada yang ditipu. Awalnya mereka dijanjikan menjadi PRT dan baby sitter. Namun ternyata dipaksa menjadi terapis spa.

“Korban dipaksa menjadi terapis spa dan sempat dicabuli. Korban boleh pulang, kalau pihak keluarga menebus uang,” ucapnya.

Faktor Keluarga

Yatini Sulistyowati Focal Point KSBSI mengatakan kasus TPPO belum pernah berkurang sampai tahun ini. Dikatakannya, tahun ini pemerintah sedang menggalakan ada 21 wilayah untuk pencegahan TPPO.

Namun, dirinya belum mengetahui lebih jelas tentang wilayah mana saja yang dijadikan target TPPO.

Ia tak membantah, mereka yang menjadi korban memang tergiur iming-iming gaji tinggi. Namun ujung-ujungnya, mereka korban penipuan. Banyak yang mendapat perlakuan kekerasan fisik sampai dijadikan kurir Narkoba.

“Saya berharap pemerintah harus lebih bersikap transparan kepada publik menyikapi maraknya kasus perdagangan orang,” ujarnya.

Menurutnya, UU PPMI dinilai sudah bagus. Tapi sayang belum memiliki semangat menindak pelaku sampai ke akar rumput. Termasuk, koordinasi tiap birokrasi dalam penindakan pelaku TPPO masih tumpang tindih. Contohnya, ketika Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) sedang melakukan penindakan terhadap kasus perdagangan orang masih jarang melibatkan pihak Kepolisian.



Yatini Sulistyowati Focal Point KSBSI

Selain itu petugas pengawasan milik pemerintah untuk memantau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri pun sangat minim. Hanya sekitar 1500 orang dan ditempatkan tingkat provinsi. Sementara, perekrutan yang dilakukan pelaku TPPO sindikat perdagangan prosedural banyak terjadi di kabupaten dan desa.

Sementara di desa sendiri, sosialisasi mengenai prosedur menjadi PMI secara resmi dari pemerintah pun belum ada. Justru pelaku TPPO yang banyak menguasai sosialisasi masyarakat bagi yang ingin bekerja ke luar negeri. Jadi tak heran, jika kasus perdagangan orang masih tetap tinggi. Para calo itu pun memberikan bonus uang, jika ada anggota keluarga yang mau bekerja ke luar negeri.

Intinya, dia meyakini jumlah kasus TPPO yang ditangani Kepolisian sebenarnya jauh lebih tinggi karena masih banyak kasus-kasus diluar itu yang belum diungkap.

“Alasan lain masih banyak korban yang segan melaporkan ke Kepolisian, karena pelakunya tak jauh dari keluarga terdekat dan orang yang disegani di lingkungan masyarakat. Sehingga membuat banyak kasus yang terjadi berhenti ditengah jalan,” tutupnya.

Rantai kejahatan ini bisa dihentikan jika ada kemauan dari pemerintah. Sebab sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah terbilang masih lemah. “Masalah ini sangat erat dengan dunia bisnis dan banyak orang yang punya kepentingan. Jadi butuh sikap yang tegas,” tutupnya.



Audensi DEN KSBSI dengan Menteri Tenaga Kerja, M. Hanif Dhakiri Di Ruang Kerjanya (Dokumen Foto KSBSI)

Pesan Menaker, Serikat Buruh Harus Mampu Membaca Tantangan Jaman

M. Hanif Dhakiri Menteri Tenaga Kerja (Menaker) menyampaikan pesan kepada serikat pekerja/buruh agar mampu membaca tantangan jaman. Jika hanya menjalankan rutinitas iuran dan aksi demo, tapi tidak ada terobosan baru, dipastikan ditelan jaman.

Hal itu disampaikannya ketika menerima audiensi Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, Jakarta Selatan. Hanif menjelaskan, berdasarkan data yang dirangkum kementeriannya, data jumlah serikat buruh semakin tahun terus bertambah.

Namun jadi persoalan, jumlah minat buruh masuk serikat mengalami penurunan. Bahkan, jumlah serikat pekerja/buruh yang ada di perusahaan ikut mengalami penurunan. Sementara jumlah perusahaan meningkat setiap tahunnya.

"Saya berharap serikat buruh harus membangun kembali kekuatannya. Negara tetap membutuhkannya untuk penyeimbang kebijakan," ucap Hanif.

Selain itu, serikat buruh tak usah lagi terjebak dalam persoalan konflik internal. Tapi harus

membangun organisasi modern, melahirkan regenerasi kepemimpinan.

Hanif juga menyampaikan serikat buruh harus bisa membaca tantangan jaman di era revolusi industrilisasi 4.0. Menurut politisi PKB itu, KSBSI dinilainya merupakan serikat buruh yang mampu menjawab tantangan.

"Waktu saya masih aktivis mahasiswa, KSBSI dikenal oposisi buruh yang turut menumbangkan Orde Baru. Sekarang gerakannya berubah. Tak sekadar kritis, namun sudah moderat dan memberikan solusi," ujarnya.

Intinya KSBSI harus mempertahankan tradisi gerakannya yang selama ini dikenal tak sebagai serikat pengkaderan melalui program pelatihan dan pendidikan.

Kepada Elly Rosita Silaban dan Dedi Hardianto (Presiden dan Sekjen) Menaker berpesan KSBSI harus terus menjalankan tradisi melahirkan regenerasi yang berpikir modern, kreatif dan kritis.

"Semoga KSBSI bisa menjadi contoh serikat buruh yang bisa menjawab tantangan jaman. Karena di era revolusi industrialisasi 4.0 sangat berdampak terhadap buruh di dunia industri," tutupnya. **(Andreas)**



Sengketa Industrial di PT Dian Rakyat, Mereka Menolak Tunduk

Hampir tiga tahun 170 buruh tetap kompak menuntut hak pesangonnya dari PT Dian Rakyat. Sekadar tahu, perusahaan jasa percetakan ini sekarang dikelola oleh Mario Alisjahbana anak dari Sutan Takdir Alisjahbana, legenda sastrawan Indonesia angkatan pujangga baru.

Kabarnya, perusahaan ini sedang kesulitan keuangan sejak tahun 2014. Sehingga, pemilik perusahaan mencari alternatif, menawarkan sebagian buruh bersedia mengundurkan diri untuk menghemat keuangan. Pada umumnya buruh menolak tawaran itu. Sehingga lahir kebijakan kontroversial dari pihak perusahaan yang menimbulkan konflik dengan serikat buruh. Pasalnya, 170 buruh yang bersikap menolak mengundurkan diri, statusnya langsung dianggap tak bekerja lagi di perusahaan.

Selain itu, penyebab konflik disebabkan karena upah yang seharusnya tiap bulan diberikan waktu itu tidak lancar lagi. Namun menurut pengakuan Pengurus Komisariat (PK) FSB NIKEUBA KSBSI PT Dian Rakyat, sebenarnya tak mempermasalahkan gaji yang tak lancar diberikan. Walau pemberian gaji cara mencicil itu memang berdampak pada perekonomian keluarga.

Ketika diwawancarai, Adi Ardiansyah Ketua Pengurus Komisariat (PK) FSB NIKEUBA KSBSI PT Dian Rakyat mengatakan dirinya bersama buruh

lainnya tetap menuntut perusahaan menepati janji gaji yang tertunda.

"Memang pada Juni 2017, pihak perusahaan akhirnya sudah memberi gaji yang sempat tertunggak," terangnya, ketika diwawan carai, di Cipinang Muara, Jakarta Timur, berapa waktu lalu. Tapi persoalan belum usai.

Kemudian berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta Pusat. Setelah 6 bulan persidangan, akhirnya gugatan dimenangkan buruh. Pada 2019 PT

Dian Rakyat mengajukan kasasi di Mahkamah Agung (MA). Namun hakim memutuskan menolak kasasi itu. Sehingga MA memutuskan pihak perusahaan harus menjalankan kewajiban membayar pesangon 170 buruh, sebesar ketentuan masing masing upah.

Namun yang disesalkan oleh Adi bersama 170 buruh lainnya, pihak PT Dian Rakyat terkesan tidak mentaati keputusan MA. Pasalnya, beberapa waktu lalu pihak perusahaan mulai menjual satu persatu aset perusahaan.

"Ada beberapa mesin sudah dijual secara rongsokan. Terakhir ada mesin cetak kualitasnya masih bagus hendak dijual, makanya pintu perusahaan kami hadang biar gagal dijual. Pemilik perusahaan telah melanggar kesepakatan karena

Potret PT.Dian Rakyat Di Kawasan Pulo Gadung Jakarta Timur

status aset perusahaan masih sengketa dengan kami," ucapnya.

Ia menegaskan pihak pekerja tidak melarang jika aset mesin perusahaan hendak dijual, namun dengan syarat harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya, jika mesin itu dijual tujuannya untuk membayar pesangon 170 pekerja, tak masalah.

"Tapi mesin yang mau dijual kan kami tidak tahu untuk apa tujuannya, apakah untuk membayar pesangon kami atau membayar utang lainnya. Apalagi rencana mesin yang hendak dijual lalu kami gagalkan diperkirakan kalau harga bekas mencapai Rp. 2,5 miliar," jelasnya.

Menolak Tunduk

Sementara itu, Bambang Suta Payuana Plt Ketua Umum FSB NIKEUBA KSBSI ikut menegaskan perusahaan tak usah kuatir masalah aset perusahaan yang sedang bersengketa dengan pekerja. Atau tegasnya, dia mengatakan hormati hasil keputusan MA.

"Sekarang ini kan sedang dalam Aanmaning sambil menunggu proses penyitaan aset perusahaan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur," ucapnya.

Bambang menjelaskan pihaknya selama ini banyak mengalah dan pihak perusahaan dinilainya banyak melanggar kesepakatan. Contoh, ketika aset mesin hendak dijual, pihak perusahaan mengatakan mesin itu bukan milik PT Dian Rakyat, tapi milik PT Pelangi Nusa Gemilang.

"Namun ketika pekerja mempertanyakan dokumen resmi kepemilikan mesin, apakah milik PT Pelangi Nusa Gemilang, justru pihak

perusahaan tidak mau menunjukkan buktinya. Ini kan sangat aneh," ujarnya.

Intinya Bambang mengatakan, FSB NIKEUBA KSBSI terus berjuang mendapatkan hak pesangon buruh sebesar Rp.10,8 miliar. Ia juga menyampaikan pihaknya masih membuka ruang dialog kepada manajemen perusahaan dengan syarat solusi jalantengah.

Sebab, status 170 orang buruh yang dianggap tidak bekerja lagi oleh perusahaan justru oleh pengadilan diputuskan mereka masih buruh tetap perusahaan sesuai prosedur hukum. Sebab, sampai hari ini belum ada status resmi PHK dari perusahaan, jadi jalan tengahnya mereka hanya menuntut pesangon.

"Intinya kami dari FSB NIKEUBA KSBSI tidak mau mempersulit persoalan ini. Justru yang sedang diperjuangkan hanya hak pesangon, supaya perusahaan menepati komitmennya. Makanya kami minta mereka harus transparan kalau ingin menjual aset mesin," tutupnya. (Andreas)



Hubungan Dialog Sosial KSBSI Dengan PT Wilmar Kian Mengakur

Pada tanggal 26-27 Agustus lalu, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia mengadakan workshop dengan tema "Penguatan Network buruh di PT. Wilmar" Acara ini di fasilitasi oleh IIWE. dalam rangka menguatkan dialog sosial dengan pemerintah dan pengusaha.

Tak bisa dibantah, sejak beberapa tahun ini KSBSI perlahan mulai merubah gerakannya dengan mengedepankan kedewasaan berdialog dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Sebelumnya KSBSI dikenal sebagai serikat buruh yang radikal dan sering kontradiksi dengan pemerintah dan pengusaha ketika membela hak buruh.

Setelah melakukan evaluasi karena terlalu banyak korban, mengeluarkan waktu dan tenaga, akhirnya KSBSI membuat format baru gerakannya. KSBSI sekarang ini lebih mengedepankan kedewasaan berpikir dalam upaya menciptakan perubahan untuk buruh.

Acara yang diselenggarakan di Hotel Ibis Tamarin Jakarta Pusat ini melibatkan 30 orang dari pengurus dan anggota 6 federasi yang berafiliasi dengan KSBSI. Sekadar tahu, hubungan dialog sosial yang sudah dijalani KSBSI dengan PT.Wilmar sudah berjalan sejak tahun 2014. Sementara, anggota KSBSI dari lintas federasi menyebar di 17 perusahaan kelapa sawit PT Wilmar diberbagai daerah.

Pembicara yang hadir dalam workshop sangat juga sangat berkompeten dibidangnya. Seperti Sumarjono Saragih Direktur Ketenagakerjaan Gabungan Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia, Erlina Panitri Head of Human Capital PT Wilmar, Tanti Kasie Binwasnaker-Kementerian



Tenaga Kerja serta Tendency Gunawan International Labor Organization (ILO) perwakilan Jakarta.

Dalam diskus tersebut, GAPKI menawarkan siap memfasilitasi federasi yang berafiliasi dengan KSBSI untuk memperluas akses serikat ke perusahaan sawit (bukan hanya Wilmar) diseluruh Indonesia yang menjadi anggota GAPKI. Tentu saja, mendapat tawaran itu, federasi yang berafiliasi KSBSI (Hukatan, Kamiparho, Lomenik, Nikeuba, F-KUI dan FTA) menyambutnya dengan baik.

PT Wilmar merupakan perusahaan kelapa sawit terbesar dan skala perdagangan produksinya di Asia Tenggara, merupakan pasar potensial untuk pengembangan serikat buruh. Diperkirakan ada 30 ribu buruh yang belum berserikat untuk mendapatkan perlindungan dan haknya sebagai buruh dalam perusahaan.

Selain itu peserta juga membahas materi pemutakhiran data keanggotaan, rencana penguatan jejaring maupun kegiatan lobby advokasi serta pemilihan tema kampanye untuk satu tahun ke depan bagi buruh di PT Wilmar. (Maria)



Dokumen KSBSI

Rasmia Pakpahan, Ketua Umum FKUI KSBSI (Sudinaker) di Kabupaten itu juga terkesan tutup mata dan main mata. Padahal, buruh

yang di PHK sudah bolak-balik melaporkan secara resmi, tapi belum ada proses untuk mediasi dari kedua belah pihak.

"Sebenarnya pengurus dan anggota FKUI KSBSI di PT. Conch North Sulawesi Cement sudah tak sabar mau demo ke perusahaan, karena hak mereka selama ini banyak diabaikan. Tapi masih saya suruh bersabar untuk mengikuti prosedur. Kasus ini akan kami laporkan ke Dinas Tenaga Kerja tingkat Provinsi dulu," tutupnya. (Andreas)

BERITA KILAS

DEN KSBSI Sambangi BP Tapera

DEN KSBSI menyambangi kantor Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Kunjungan disambut Komisioner BP Tapera Adi Setianto dan jajarannya. Kunjungan kali ini beragendakan silaturahmi dan dialog karena ada beberapa hal yang dibahas mengenai program perumahan buruh

Adi Setianto mengatakan, pada tahap awal pekerjaan mereka akan lebih fokus mengelola tabungan perumahan ASN. Badan (BP) Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan lebih dahulu difokuskan menangani kebutuhan perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebelum mengelola tabungan perumahan masyarakat umum.

"BP Tapera juga harus membangun integritas dan kepercayaan publik sehingga menarik minat masyarakat luas," kata Adi.

BP Tapera dan programnya juga masih belum banyak diketahui masyarakat. Sehingga menurut Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban perlu adanya kemitraan yang dibangun BP Tapera dan KSBSI dalam hal sosialisasi.

"KSBSI siap akan kawal sosialisasi BP Tapera kepada anggota serikat buruh. KSBSI



membuka ruang untuk BP Tapera mensosialisasikan programnya," katanya

la berharap BP Tapera bisa menjadi solusi kemudahan buruh untuk memiliki rumah huniannya sendiri, di tengah-tengah kebutuhan yang semakin banyak.

Sekjen KSBSI Dedi Hardianto menyampaikan peranan serikat buruh dalam membangun sebuah kolaborasi dan kemitraan terhadap pemerintah, pengusaha dan masyarakat.

Berkenan dengan BP Tapera, Sekjen menyampaikan sepanjang hal ini bermanfaat untuk buruh, maka perlu adanya sebuah sinergi antara KSBSI dan BP Tapera.

"Mengajak kawan-kawan serikat untuk terlibat dalam program BP Tapera. Menilai ini bermanfaat untuk buruh," ucapnya. (Website KSBSI.org)

PT. Conch North Sulawesi Cement Terindikasi Memberangus Serikat Buruh

PT. Conch North Sulawesi Cement, Kabupaten Boolang Mongondow, Sulawesi Utara, telah satu tahun beroperasi. Mayoritas pemilik saham dari Negara Cina ini memperkerjakan 700 orang buruh. Kabarnya ada 150 buruh dari Cina, selebihnya pekerja lokal. Tapi ada yang menjadi masalah di perusahaan itu, karena terindikasi melakukan pemberangusan serikat buruh.

Hal ini disampaikan Rasmina Pakpahan, Ketua Umum FKUI Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Dia mengatakan perusahaan tersebut dinilai melakukan diskriminasi kebebasan serikat buruh. Sebab, Ketua Dewan Pengurus Cabang dan Pengurus Komisariat (PK) di perusahaan PT. Conch North Sulawesi Cement mendapat perlakuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa ada prosedur resmi.

Dia menceritakan, ketika mengunjungi ke perusahaan meminta klarifikasi kasus PHK yang menimpa anggotanya, pihak PT. Conch North Sulawesi Cement terkesan pun tertutup. Lalu Rasmina pun mengajak pertemuan dan dialog dengan pengurus dan anggota yang di PHK untuk mendapat informasi yang mendalam.

Hasil kesimpulan dialog sementara, mereka yang di PHK rupanya bersikap kritis terhadap perusahaan. Setelah buruh bergabung di FKUI KSBSI, rasa kesadaran mereka menuntut hak upah yang layak sangat tinggi. Pasalnya, buruh lokal yang bekerja di PT. Conch North Sulawesi Cement sejak berdiri belum mendapat hak sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Rasmina menyimpulkan jadi sangat wajar saja jika buruh lokal bersikap kritis menuntut hak normatifnya sesuai Undang-Undang



Dokumen KSBSI

PT. Conch North Sulawesi Cement

normatifnya sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003. Sebab tuntutan tersebut tak berlebihan. Berdasarkan pengakuan dari anggota, ada dugaan kuat jika perusahaan ini melakukan diskriminasi kepada buruh lokal.

“Ada juga pengakuan dari anggota jika bahwa buruh dari Cina diberikan asuransi kesehatan tersendiri beserta fasilitas mess dan apotik khusus. Sementara buruh lokal tidak diberikan,” ujarnya, ketika diwawancarai di Sekretariat KSBSI, Cipinang Muara, Jakarta Timur.

Mirisnya lagi, Ketua PK FKUI PT. Conch North Sulawesi Cement yang ikut di PHK adalah putra lokal. Berdasarkan pengakuan, dia sendiri ikut terlibat membantu pembebasan lahan perusahaan agar segera beroperasi. Mengingat telah terjadi PHK sepihak, karena tak ada prosedur resmi, Rasmina mengatakan FKUI KSBSI akan menuntut untuk memperkerjakan kembali yang di PHK.

Sebab buruh yang di PHK tak mempunyai bukti melakukan pelanggaran apalagi melawan hukum. Sebab dari 200 anggotanya di perusahaan itu sekitar 50 buruh telah di PHK. Mirisnya lagi Suku Dinas Tenaga Kerja

Kepmenaker No. 228 Tahun 2019 Tak Berpihak Pada buruh Lokal



Supardi, Sekjen FSB KAMIPARHO KSBSI

Pada 27 Agustus 2019, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mendadak menerbitkan baru tentang aturan Tenaga Kerja Asing (TKA) atau tepatnya Kepmenaker No. 228 Tahun 2019. Dimana isi Kepmenaker itu mengatur tentang jabatan tertentu yang bisa diduduki Tenaga Kerja Asing (TKA) ketika bekerja di Indonesia.

M Hanif Dhakiri Menteri Tenaga Kerja (Menaker) beralasan peraturan TKA yang baru diterbitkan diputuskan berdasarkan pertimbangan yang matang sesuai kebutuhan zaman. Lebih luas, Menteri dari politisi PKB ini mengatakan diantara perubahan jabatan struktur TKA adalah seperti direktur atau komisaris yang tak mengurus personalia sudah diperbolehkan untuk menjabat.

Atau kesimpulannya, Hanif mengatakan selama jabatan TKA ini tidak bertabrakan dengan undang-undang yang berlaku tak menjadi

masalah. Selain itu, ia juga menjelaskan walau posisi jabatan TKA mendapat perubahan, tapi jabatan TKA tersebut nantinya bisa dievaluasi. "Jabatan TKA bisa kok dievaluasi. Minimal dua tahun atau kalau memang terdesak pemerintah bisa mengevaluasi," ujarnya Hanif.

Ada 66 pos jabatan yang boleh diduduki oleh TKA di Indonesia. Diantaranya jabatan sektor pendidikan, kesenian, real estate, hiburan, informasi dan telekomunikasi, keuangan, jasa, ilmiah dan beberapa sektor lainnya.

Namu terbitnya Kepmenaker No. 228 Tahun 2019 itu langsung mendapat kritikan tajam dari aktivis buruh. Pasalnya, kebijakan itu dinilai sangat jelas merugikan tenaga kerja lokal. Karena pemerintah terkesan mengistimewakan jabatan TKA yang bekerja di Indonesia.

Supardi, Sekjen FSB KAMIPARHO Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan keputusan Menaker membuka tambahan jabatan tertentu kepada TKA dinilainya tidak berpihak pada buruh. Dia meneliti, Kepmenaker ini pembiasaan pasal 42 - 49 UU no. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) yang memang mengatur tentang TKA.

"Bila membaca Pasal 42 ayat (4) UUK, kehadiran TKA memang dibatasi sehingga tenaga kerja kita bisa terserap lebih banyak lagi di republik tercinta ini. Pembatasan ini dapat kita lihat dari pengenaan kata jabatan tertentu dan waktu tertentu untuk TKA yang dipekerjakan di Indonesia," ujarnya.

Namun dengan terbitnya Kepmenaker ini, maka jabatan yang awalnya dibatasi sekarang dibuka lebih luas lagi. Artinya, Kepmenaker ini merupakan proses liberalisasi ketentuan TKA. Sehingga pekerjaan di segala bidang dan fungsi bisa diduduki TKA.

"Bila membaca lampiran Kepmenaker No. 228 Tahun 2019 dapat dipastikan hampir seluruh

TENAGA KERJA ASING



jabatan dan fungsi pekerjaan di Indonesia bisa ditempati oleh TKA," jelasnya.

Kalau pun pemberi kerja mau menggunakan TKA yang tidak ada di list di Kepmenaker ini maka Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) bisa memberikan ijin. Ini kan artinya Menaker secara subjektif bisa menerbitkan ijin TKA untuk sektor maupun jabatan lainnya, dan ini lebih membuka ruang pekerjaan TKA di Indonesia.

Sarannya, Kepmenaker harus tetap mengacu pada UUK yang saat ini masih eksis dan Pasal 42 -49 masih berlaku tanpa perubahan satu kata pun. Pasal 45 UUK yang mewajibkan adanya tenaga kerja pendamping sebagai bentuk alih teknologi tentunya tidak akan dilakukan oleh TKA. Sebab jabatan dan pekerjaan yang disebut di Kepmenaker ini tidak dalam proses alih teknologi.

"Jadi isi Kepmenaker ini tidak boleh bertentangan dengan Pasal 42-49 UUK. Dalam hal ini Menaker saya nilai telah melakukan kesalahan yang sistemik," tegasnya.

Karena TKA sudah diberikan ruang yang sangat luas untuk bekerja di Indonesia tanpa mempertimbangkan keberadaan tenaga kerja, sekaligus menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal. Disisi lain, tentunya saja kalangan pengusaha asing akan lebih senang menggunakan TKA. Sebab tidak ada TKA

menjadi pekerja tetap. Bila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan diberikan Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak seperti yang diatur di Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UUK.

"TKA hanya akan diikat oleh perjanjian kerja waktu tertentu yang memastikan perusahaan akan dengan mudah merekrut dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," terangnya.

Intinya, pemerintah harus memper timbangkan angkatan Kerja, yang per Februari 2019, mencapai 136,18 juta dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,01 persen atau sekitar 6,82 juta orang. Kalau pun ada investor asing menanamkan modalnya di Indonesia tetapi tenaga kerjanya berasal dari negara mereka, tentu saja tak ada dampak baik buat tenaga kerja lokal.

"Justru saya anggap Kepmenaker ini berpotensi meningkatkan pengangguran terdidik bangsa ini. Setelah aturan ijin perusahaan outsourcing di liberalisasi, kini Menaker meliberalisasi regulasi TKA. Besok regulasi ketenagakerjaan apa lagi yang akan di liberalisasi?," lugasnya. (AH)

KSBSI Ikut Festival Pawai Obor Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 Hijrah

Pada malam pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 Hijrah, pada 31 Agustus 2019, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia ikut terlibat perayaan acara pawai keliling kampung sambil membawa obor. Acara ini diadakan warga RT 03 Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur dan pada pelepasan pawai keliling kampung, langsung di lepas oleh Eddy Sofyan SH Lurah Cipinang Muara serta didampingi Zaenal Arifin Ketua Rukun Waraga (RW) 03 beserta seluruh Ketua Rt.

Berdasarkan pantauan, festival pawai obor dari 18 rukun tetangga (RT) diikuti kurang lebih 1000 orang. Sementara Bambang SY, mewakili KSBSI ikut membantu mobil komando untuk suksesnya acara yang dimulai pukul jam 20.00_22.30 WIB. Acara itu juga di isi beberapa perlombaan serta santunan anak kepada yatim piatu.

Dalam kata sambutannya, Eddy Sofyan Latief meminta seluruh warga Cipinang Muara, agar bisa menjaga ketentraman supaya NKRI tetap bersatu. Dia juga menyampaikan rasa terimakasih, karena budaya kebersamaan warga di kelurahan yang dipimpinnya masih kompak dan memiliki toleransi yang tinggi.

Sementara Zaenal Arifin, juga mengucapkan terimakasih kepada KSBSI atas sumbangsihnya, karena ikut memberikan bantuan mobil komando untuk kelancaran suksesnya festival pawai obor. Begitu pula, pihak KSBSI yang selama ini berkantor di Cipinang Muara Raya No 33, menyampaikan bilamana ada warga disekitar bermasalah perburuhan supaya bisa datang ke kantor KSBSI agar bisa diberi bantuan advokasi. KSBSI menawarkan untuk Karang Taruna RW 03, menjadi agen salah satu program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu program Perisai (AH)



Keikutsertaan KSBSI dalam kegiatan kemasyarakatan

DPP Federasi Hukatan KSBSI Gelar Training Dialog Sosial Di Kubar

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC-F Hukatan-KSBSI) Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kaltim, sukses menggelar Training Dialog Sosial di Hotel Nici, Kelurahan Barong Tongkok, Sendawar, Jumat, beberapa waktu lalu.

Training Dialog Sosial ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kubar, Ambok Upeq yang membacakan sambutan Kepala Disnakertrans Kubar Silan.

“Disnakertrans Kubar menyambut baik kegiatan Training Dialog Sosial DPC-F Hukatan, KSBSI,” kata Ambok Upeq.

Selain itu, Pemkab Kubar juga berharap semua perusahaan di Kubar baik yang beroperasi di bidang pertambangan, perikanan ataupun perkebunan bisa menerapkan peraturan dengan selalu melihat hak dan kewajiban para pekerja.

Ketua DPC F Hukatan-KSBSI Kubar, Ancah, mengatakan tujuan Training Dialog Sosial adalah untuk menjawab tantangan ke depan bagi karyawan Federasi Hukatan KSBSI Kubar.



Training Sosial Dialog DPC FSB Hukatan Kutar Barat, dari Kiri BPJS Kesehatan Dinas Tenaga Kerja, Ketua Umum F Hukatan.

"Melalui peningkatan profesionalitas, kemampuan dan kualitas pribadi pekerja atau buruh," jelasnya kepada wartawan usai acara itu.

Ancah mengungkapkan, indikator kualitas serikat buruh adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai perwujudan Hubungan Industrial. Dia menuturkan, selama ini banyak diantara para pekerja yang masih awam tentang dunia Serikat Buruh.

"F Hukatan-KSBSI wadah memperjuangkan kesamaan kepentingan dan kesamaan hak. Advokasi atau pembelaan dari persoalan yang merugikan pekerja jika pengusaha melanggar aturan ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang 13," ucapnya.

Ancah menambahkan, melalui Training Dialog Sosial tersebut F Hukatan-KSBSI Kubar akan semakin kuat bersama memperjuangkan kepentingan atau hak pekerja/buruh.

"Pengurus F Hukatan-KSBSI mengakomodir kepentingan karyawan/pekerja/buruh, sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sebagai jembatan pekerja dan perusahaan bahkan pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang timbul oleh adanya perselisihan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) F-Hukatan KSBSI, Mathias Mehan yang juga hadir dalam acara itu mengungkapkan, kunjungannya ke Kubar sebagai silaturahmi, menampung informasi

dari anggota dan pengurus ditingkat perusahaan di kabupaten/kota di Kaltim.

"Pengurus DPC F Hukatan KSBSI Kubar harus kreatif memacu diri, memperjuangkan kesejahteraan buruh/pekerja. Melalui dialog saya mengetahui masih banyak buruh yang bekerja di perusahaan di Kubar yang belum mendapatkan hak dan kesejahteraan yang sewajarnya dari pihak perusahaan," urainya.

Mathias Mehan menambahkan, tujuan kunjungannya ke Kubar juga sebagai konsolidasi internal organisasi sampai tingkat akar. Sehingga pengurus DPC F Hukatan KSBSI Kubar diharapkan terus memacu diri dengan terus mengagendakan pendidikan buruh.

"Saya berharap DPC F Hukatan KSBSI Kubar mengelola manajemen organisasi dengan baik, sehingga bermanfaat bagi anggota," tandasnya.

Pemateri training menyuguhkan kepada peserta pelatihan, diantaranya, Dasar-Dasar Keorganisasian, Hak dan Kewajiban Buruh/Pekerja, dan Penanganan Hubungan Industrial. Lalu ada juga tukar pikiran antar pengurus, mendengar aspirasi anggota. Hadir pula Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), serta para pengurus komisariat ditingkat perusahaan. Diantaranya PT Lonsum dan sejumlah perusahaan lainnya. (Sumber: faktapres.id)

DEN KSBSI Audiensi Bersama

Organisasi Buruh Internasional (ILO) Perwakilan Jakarta

Organisasi Buruh Internasional atau dikenal ILO menerima kunjungan DEN KSBSI dalam rangka audiensi soal perburuhan di Indonesia dan global. Pada kesempatan ini ILO diwakili Irham Ali Saifuddin Program Officer dan perwakilan DEN KSBSI Sekjend KSBSI Dedi Hardianto.

Dalam pertemuan itu menyampaikan KSBSI baru saja menyelesaikan kongres pada bulan Juni dan sudah memiliki kepengurusan yang baru periode 2019-2023 serta visi dan misi kerja yang akan dijalankan roda organisasi.

"Tentu saja kepengurusan baru DEN KSBSI sangat penting disampaikan untuk menjadi bahan administrasi di ILO agar tidak memakai kepengurusan lama," kata Sekjen KSBSI Dedi Hardianto, Selasa (10/9/2019).

Dalam pertemuan itu Irham Ali Saifuddin mewakili Michiko Miyamoto Direktur ILO menyambut baik kepengurusan DEN KSBSI yang baru terpilih. Sebab ILO sendiri telah lama mengenal sepak terjang pergerakan

KSBSI dari tingkat nasional sampai internasional. Selain itu ILO juga meminta DEN KSBSI untuk terus terlibat kampanye penghapusan diskriminasi di tempat kerja sesuai Konvensi ILO 190 agar bisa diratifikasi.

Dedi langsung menyampaikan menyikapi Konvensi ILO 190 di ILC Juni 2019 kemarin, KSBSI terlibat dan berperan aktif. KSBSI berharap bisa mengambil peran untuk mendorong pemerintah agar konvensi 190 itu diratifikasi di Indonesia.

Selain itu, sekarang ini KSBSI rutin membuat forum diskusi berbentuk Cooffe Morning. Dalam forum itu, bisa mengundang teman teman lintas serikat buruh yang menyangkut lembaga terkait. Termasuk dalam forum tersebut bisa menjadi forum yang bisa menyampaikan pengurus yang diutus di luar negeri untuk bisa disampaikan kepada kawan kawan yang belum pernah diutus keluar negeri untuk kepentingan organisasi. (Tunjang)



Saifuddin Program Officer dan Sekjend KSBSI Dedi Hardianto.

Sudah Saatnya Serikat Buruh Mandiri Dalam Gerakan Koperasi



Selain harus bisa memberikan tanggung jawab advokasi dan pendidikan kepada anggota, serikat buruh juga harus bisa mandiri dalam keuangan organisasi. Oleh sebab itulah, untuk mewujudkan kemandirian ekonomi organisasi maka harus didukung dengan gerakan koperasi.

Bertempat di Kantor Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI, Cipinang Muara, Jakarta Timur, digelar agenda coffee morning, yang rutinitas dilakukan seminggu sekali. Untuk agenda diskusi minggu ini mengangkat tema koperasi dan mengundang perwakilan pembicara dari Koperasi Pekerja/Buruh Indonesia (KOPBI).

Dalam pemaparannya, Toto Aji Nugroho Manajer Operasional KOBPI menyampaikan tujuan lahirnya KOPBI merupakan semangat untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Selain itu KOPBI juga merupakan koperasi tripartit pertama di Indonesia bahkan di dunia yang bisa menyatukan enam konfederasi serikat buruh/serikat pekerja serta enam kementerian, DPN APINDO dan KADIN Indonesia.

Dia berharap agar seluruh anggota KSBSI bisa bergabung menjadi anggota KOPBI dengan syarat membayar simpanan pokok 100 ribu rupiah dan simpanan wajib per-bulan hanya 25 ribu rupiah seluruh serikat pekerja/buruh.

"Untuk membangun kemandirian ekonomi dan mensejahterakan pekerja/buruh, maka sangat positif dibentuknya koperasi," tandasnya.

Ia menyebutkan, pekerja/buruh memiliki kontribusi besar untuk menopang perekonomian negara, tapi juga pelaku utama pembangunan. Sementara misi KOPBI ingin memberikan pelayanan prima kepada pelanggan dan anggota. Dengan menyediakan produk dan jasa pangan, papan, kebutuhan utama para anggotanya dengan harga dan kualitas yang bersaing.

"KOPBI juga ingin menyediakan produk dan jasa pembiayaan yang komprehensif, kompetitif, mudah diperoleh dan aman sesuai kebutuhan anggotanya," ucap Toto.

Dedi Hardianto Sekjend KSBSI, menjelaskan tentang sejarah koperasi KOPBI yang digagas



beberapa anggota Dewan Pengupahan Nasional, tokoh aktivis serikat pekerja/serikat buruh pada 20 Juli 2018 di Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta Selatan.

Pendirian KOPBI digagas oleh beberapa anggota Dewan Pengupahan Nasional dan beberapa tokoh serikat pekerja/serikat buruh.

serikat buruh terbesar di Indonesia dan sangat potensi jika diarahkan dalam gerakan koperasi.

“Dengan adanya diskusi ini semoga KOPBI dan koperasi KSBSI bisa menyatukan visi dan misi untuk terlibat gerakan ekonomi dalam kemandirian organisasi,” ungkapnya.



KOPBI merupakan organisasi pertama yang dapat menyatukan 6 (enam) Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha dan Pemerintah.

Dia berharap koperasi yang ada di KSBSI kedepannya bisa saling bersinergi dengan KOPBI. Pasalnya, anggota KSBSI salah satu

Hal senada juga disampaikan Elly Rosita Presiden KSBSI. Ia mengatakan besarnya gerakan koperasi harus dilatar belakangi pengelolaan keuangan yang profesional. Sehingga bisa memberi manfaat bagi anggotanya. Beliau juga mengatakan koperasi yang ada setelah ada Link ke KOPBI, sehingga koperasi KSBSI nantinya akan lebih baik. (tnj)



Pakai KTP-el mu untuk Klaim JHT

Kini klaim JHT lebih mudah, tanpa harus isi formulir
cukup gunakan KTP elektronik yang valid

Dengan tetap melampirkan berkas pendukung sesuai persyaratan